

Evaluasi Komprehensif dan Rekomendasi Tata Kelola Kolaboratif Kawasan Transmigrasi Payahe, Kota Tidore Kepulauan

(Comprehensive Assessment and Governance Model Recommendation for Collaborative Management of Payahe Transmigration Area, Tidore Islands City)

Ernan Rustiadi^{1,2*}, Muhamad Ghazi Maulana¹, Putri Aisyun Husna Rahaya¹, Muhamad Nur Rizki¹, Chairani Mezia Firmanti¹

¹ Fakultas Pertanian, IPB University, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680

² Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W), IPB University, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16184

*Penulis Korespondensi: ernanrustiadi@apps.ipb.ac.id

ABSTRAK

Transmigrasi merupakan salah satu kebijakan pembangunan di Indonesia melalui kependudukan dan pembangunan wilayah. Perubahan paradigma mendorong Kawasan transmigrasi (KT) tidak hanya menyelesaikan ketimpangan penduduk, tetapi juga mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan. KT Payahe merupakan salah satu kawasan yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Indonesia. Namun hasil evaluasi terhadap implementasi perkembangan di KT Payahe menunjukkan beberapa permasalahan, diantaranya: kesenjangan dukungan kelembagaan, konflik agraria, ketimpangan pembangunan pada wilayah satuan permukiman (SP), serta pengembangan potensi yang tidak mempertimbangkan komoditas unggulan wilayahnya. Tujuan penelitian di KT Payahe adalah mengidentifikasi perkembangan wilayah serta mengevaluasi kondisi eksisting secara komprehensif diberbagai aspek (sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola) dalam membangun kawasannya. Pendekatan yang digunakan yaitu *Mixed Methods* dengan mengintegrasikan pendekatan berbasis kuantitatif, kualitatif, dan pemetaan partisipatoris untuk menyusun rekomendasi kebijakan tata kelola kolaboratif pengembangan kawasan transmigrasi Payahe. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan diperoleh beberapa isu permasalahan pengembangan wilayah KT Payah, diantaranya: 1) Keterbatasan modal dalam mengelola lahan; 2) tengkulak mendominasi rantai pasok on farm-pasar; 3) kualitas lahan subur namun tidak dikelola secara *best practice agriculture*; 4) lemahnya peran kelembagaan ekonomi; 5) Ketimpangan Infrastruktur layanan dasar dan aksesibilitas khususnya bagian selatan KT Payahe; 6) Permasalahan ekologis seperti banjir; dan 7) Konflik tenurial antara masyarakat lokal dan kawasan hutan. Revitalisasi infrastruktur pertanian dan penyelesaian isu dasar pada tingkat SP menjadi langkah awal mendorong KT Payahe berkembang sebagai pusat perekonomian baru. Luaran penelitian ini akan dipublikasi pada jurnal internasional Q2 dan mendukung perumusan kebijakan pengembangan wilayah KT Payahe.

Kata kunci: fungsi ekologis, kelembagaan, land tenurial, pengembangan wilayah transmigrasi, pemetaan partisipatoris

ABSTRACT

Transmigration is one of Indonesia's development policies that integrates population management and regional development. The paradigm shift has encouraged transmigration areas (KT) not only to address population imbalances but also to evolve into new growth centers. KT Payahe is one such area projected to become a food estate and a new economic growth hub in eastern Indonesia. However, evaluations of its development implementation reveal several issues, including institutional support gaps, agrarian conflicts, development disparities among settlement units (SP), and the exploitation of regional potential that does not align with the area's priority commodities. The objective of this research in KT Payahe is to identify regional development progress and to comprehensively evaluate the existing conditions across various aspects social, economic, environmental, and governance in order to build the area effectively. The study employs a Mixed Methods approach by integrating quantitative, qualitative, and participatory mapping methods to formulate policy recommendations for collaborative governance in the development of the Payahe transmigration area. Field identification revealed several key issues constraining the development of KT Payahe, including: (1) limited capital for land management; (2) domination of the on-farm–market supply chain by middlemen; (3) fertile land that is not managed using best agricultural practices; (4) weak roles of economic institutions; (5) disparities in basic service infrastructure and accessibility, particularly in the southern part of KT Payahe; (6) ecological problems such as flooding; and (7) tenure conflicts between local communities and forest areas. Revitalizing agricultural infrastructure and resolving foundational issues at the settlement unit (SP) level are essential first steps to enabling KT Payahe to grow into a new economic center. The findings of this research will be published in a Q2 international journal and will support policy formulation for the development of the KT Payahe region.

Keywords: ecological functions, institutional framework, land tenure, transmigration area development, participatory mapping